

Komparasi Dampak Sukuk dan Obligasi Negara terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Sofia Lutfiyati^a
Muhammad Amin^b
Lise Purnamasari^c

^{abc}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

ABSTRACT

ARTICLE HISTORY

Received:

25 June 2026

Revised

20 July 2026

Accepted:

07 August 2026

Online available:

08 August 2026

Keywords:

bonds;
sustainable
development;
sukuk.

*Correspondence

Name: Sofia Lutfiyati

E-mail:

sofialutfiyati20@gmail.com

Introduction: Sustainable development requires substantial financing, particularly to support SDG 8 (economic growth) and SDG 9 (infrastructure), the two goals most relevant to sukuk and government bonds as state financing instruments. This study compares the impact of sukuk and government bonds Indonesia's two main capital market financing instruments, which differ in structure, mechanism, and investor base on sustainable development during 2020–2024, a period reflecting post-pandemic financing dynamics with complete official data availability.

Methods: Using five years of secondary time-series data from DJPPR, the Ministry of Finance, and BPS, this study applies Ordinary Least Squares (OLS) regression to assess the effect of sukuk and bond issuance and outstanding values on GDP (economic growth indicator) and the National Road Network (infrastructure indicator).

Results: Outstanding sukuk significantly and positively affect GDP, while sukuk issuance, bond issuance, and outstanding bonds show no significant effect on GDP or the National Road Network. Simultaneously, sukuk and bonds significantly influence GDP but not the National Road Index.

Conclusion and suggestion: Sukuk outperform government bonds as a strategic instrument for financing Indonesia's sustainable development, especially in driving economic growth, though both instruments' limited effect on infrastructure suggests a need for better allocation of financing proceeds. Future research should extend the study period, add macroeconomic control variables, and use broader infrastructure indicators.

INTRODUCTION

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam perekonomian, khususnya bagi negara-negara yang memerlukan investasi dalam jumlah besar guna merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan energi terbarukan (Atikah et al., 2024). Diantara 17 tujuan SDGs, Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi) serta Tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur) menjadi bagian penting karena membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar, sementara sumber pendanaan tradisional seperti APBN dan pinjaman konvensional dinilai belum mencukupi kebutuhan tersebut (Arifin & Taqwiem, 2024). kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia pada 2020-2024 mencapai sekitar Rp6.445 triliun, yang bersumber dari pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, sehingga menegaskan

pentingnya peran pasar modal sebagai sarana penghimpunan dana pembangunan (Sakinah, 2021).

Salah satu instrumen pembiayaan pemerintah di pasar modal adalah obligasi negara (SUN), pada tahun 2020-2024 obligasi mengalami perubahan dinamika kebijakan moneter, mulai dari pelonggaran pada masa pandemi COVID 19 hingga tekanan inflasi global dan penguatan peran investor domestik pada periode 2023-2024 (Tamarysma et al., 2017). Selain obligasi konvensional, pemerintah juga mengembangkan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah yang menunjukkan tren pertumbuhan konsisten, dengan nilai outstanding meningkat dari Rp55,15 triliun menjadi Rp101,16 triliun, serta emisi tahunan yang naik dari Rp30,35 triliun menjadi Rp55,27 triliun pada periode yang sama. Sesuai dengan Pasal 44 UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dana sukuk diarahkan untuk membiayai APBN sekaligus proyek pembangunan di berbagai sektor produktif (Latifah, 2020).

Meskipun sukuk dan obligasi sama-sama berperan sebagai instrumen pembiayaan negara yang berkaitan dengan pencapaian SDGs, namun keduanya memiliki perbedaan karakteristik, mekanisme penerbitan, dan basis investor yang berpotensi menghasilkan dampak berbeda terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian terdahulu masih cenderung mengkaji kedua instrumen secara terpisah, misalnya pada penelitian (Atikah et al., 2024) yang membahas efektivitas sukuk dalam pembiayaan proyek berkelanjutan dan (Fitrah & Soemitra, 2022)) membahas peran green sukuk dalam mendukung proyek ramah lingkungan. Sementara pada oblibasi, (Cendekiawan & Firmansyah, 2024) membahas obligasi hijau sebagai instrumen sustainable finance. Studi yang membandingkan secara langsung dampak sukuk dan obligasi negara terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pada periode 2020-2024, masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu menganalisis dan membandingkan secara empiris dampak sukuk dan obligasi negara terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kedua instrumen tersebut dalam mendukung pencapaian SDGs.

LITERATURE REVIEW

Sukuk

Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata Arab "sakk" yang berarti sertifikat atau dokumen kepemilikan yang bernilai. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten membayar imbal hasil berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta mengembalikan dana pokok pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan istishna (Syaripudin et al., 2024). Sukuk memiliki enam karakteristik utama yang membedakannya dari obligasi di antaranya keharusan adanya underlying asset yang jelas sifatnya sebagai bukti kepemilikan bersama, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta umumnya diterbitkan melalui Special Purpose Vehicle (SPV). Dana hasil penerbitan sukuk diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi, dan fasilitas pendidikan, sekaligus membantu menutup defisit APBN (Wulandari & Sumriyah, 2023).

Obligasi

Obligasi merupakan instrumen surat utang konvensional yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, maupun individu sebagai sumber pendanaan. Dana yang dihimpun dari obligasi negara masuk kedalam APBN secara umum tanpa dikaitkan langsung dengan proyek tertentu, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas lebih luas dalam mengalokasikan dana sesuai kebutuhan fiskal (Fitriana et al., 2025). Di Indonesia, obligasi negara merupakan bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan dan dijamin oleh Kementerian Keuangan, sehingga dianggap sebagai instrumen investasi berisiko rendah dibandingkan dengan obligasi korporasi. Selain sebagai sumber pembiayaan, obligasi negara juga berperan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, memperluas basis investor domestik, dan mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional (Kesumadewi et al., 2024).

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan diukur melalui capaian Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan pemenuhan generasi di masa yang akan datang (Suherman et al., 2025). Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tercipta kesinambungan pembangunan jangka panjang. Khususnya tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi) yang direpresentasikan oleh produk domestik bruto (PDB), dan tujuan 9 (infrastruktur) yang direpresentasikan oleh persentase jalan mantap nasional. PDB mencerminkan kemampuan perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa secara riil, sedangkan kondisi jalan mantap mencerminkan kualitas infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk membandingkan dampak sukuk dan obligasi negara terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series periode 2020-2024, bersumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI untuk data sukuk dan obligasi negara, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data PDB dan Jalan Mantap Nasional. Teknik pengumpulan data melalui analisis dokumentasi, studi literatur, dan pengumpulan data elektronik dari publikasi resmi lembaga terkait. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sukuk (X1) yang diukur melalui nilai emisi dan nilai outstanding sukuk, serta obligasi negara (X2) yang diukur melalui nilai emisi dan nilai outstanding obligasi. Variabel dependen adalah pembangunan berkelanjutan (Y), diukur melalui pertumbuhan PDB dan kondisi Jalan Mantap Nasional. Analisis data dilakukan oleh uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis berupa uji F (simultan) dan uji T (parsial) pada taraf signifikansi 5%. Metode OLS ini digunakan untuk mengestimasi hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen kepada variabel dependen berdasarkan *time series* dalam periode waktu tertentu.

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1,t} + \beta_2 X_{2,t} + \dots + \varepsilon_t$$

Y_{it}	:	Nilai variabel dependen pada periode ke-t
α	:	Konstanta (<i>intercept</i>)
$\beta_1, \beta_2, \dots$	:	Koefisien Regresi (parameter)
$X_t, X_{2,t}$	:	Nilai variabel independen pada unit ke- I dan periode ke- t
ε_{it}	:	Error term (Galat) Pada unit ke-I dan waktu ke-t
t	:	Periode Waktu

RESULT AND DISCUSSION

Sebelum dilakukan estimasi regresi, keempat model penelitian sukuk terhadap PDB, sukuk terhadap jalan mantap nasional, obligasi terhadap PDB, dan obligasi terhadap jalan mantap nasional, diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik. Gambar, tabel, dan diagram harus dapat diedit, dan tidak boleh menggunakan gambar.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi OLS

Model	VIF	Prob. Jarque-Bera	Prob. Obs*R ² (BPG)	Durbin-Watson
Sukuk – PDB	1,043	0,625	0,386	2,771
Sukuk – Jalan Mantap Nasional	1,043	0,770	0,2055	2,955
Obligasi – PDB	4,273	0,804	0,1709	2,436
Obligasi – Jalan Mantap Nasional	4,273	0,808	0,1091	2,592

Sumber: data diolah menggunakan eviews, 2026.

Pada tabel 2 nilai VIF pada seluruh model berada di bawah 10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Uji normalitas Jarque-Bera menunjukkan probabilitas di atas 0,05 pada keempat model, yang berarti residual berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan Godfrey juga menunjukkan probabilitas Obs*R² di atas 0,05, sehingga tidak terindikasi heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi, model obligasi berada pada rentang ideal ($1,5 < DW < 2,5$), sedangkan model sukuk menunjukkan nilai DW sedikit di atas 2,5 yang mengindikasikan potensi autokorelasi negatif ringan kondisi yang lazim terjadi pada data time series dengan jumlah observasi terbatas ($n = 5$). Secara keseluruhan, keempat model dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Ringkasan hasil uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji T), dan koefisien determinasi (R^2) untuk keempat model ini yaitu.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Aspek	Sukuk	Obligasi
Uji F terhadap PDB	Sig = 0,0078	Sig = 0,3317
Uji T terhadap PDB	Emisi sukuk = 0,1985 Outstanding sukuk = 0,0039	Emisi obligasi = 0,7438 Outstanding obligasi = 0,0567
R ² terhadap PDB	0,98	0,93
Uji F terhadap Jalan Mantap Nasional	Sig = 0,121	Sig = 0,118
Uji T terhadap Jalan Mantap Nasional	Emisi sukuk = 0,775 Outstanding sukuk = 0,063	Emisi obligasi = 0,991 Outstanding obligasi = 0,201
R ² terhadap Jalan Mantap Nasional	0,75	0,76

Sumber: Data diolah menggunakan eviews, 2026.

Hasil regresi menunjukkan bahwa sukuk dan obligasi negara sama-sama memberikan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan melalui indikator PDB dan Jalan Mantap Nasional, meskipun dengan tingkat signifikansi dan pengaruh yang berbeda. Pada hasil uji F menunjukkan bahwa sukuk terhadap PDB dan obligasi terhadap PDB sama-sama signifikan secara simultan pada taraf 0,05, dengan nilai probabilitas sukuk yang lebih kecil yang membuktikan bahwa pengaruh yang relatif lebih kuat dibandingkan obligasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, sukuk maupun obligasi terhadap Jalan Mantap Nasional sama-sama tidak signifikan secara simultan, hal ini disebabkan oleh jeda waktu (time lag) antara penghimpunan dana dan realisasi fisik pembangunan, serta alokasi dana yang tidak semata berfokus pada sektor jalan. Secara parsial hanya outstanding sukuk yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Sementara itu, emisi sukuk, emisi obligasi, dan outstanding obligasi belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDB meski arah hubungannya tetap positif. Pada indikator Jalan Mantap Nasional, seluruh variabel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial, yaitu emisi sukuk, outstanding sukuk, emisi obligasi, outstanding obligasi, meskipun seluruhnya menunjukkan arah hubungan yang positif. Hasil yang tidak signifikan ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan proyek jangka panjang sehingga dampak pembiayaan tidak dapat dirasakan secara langsung.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa outstanding sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB (koefisien 0,342; $p = 0,0039$), sedangkan emisi sukuk berpengaruh positif namun tidak signifikan ($p = 0,1985$). Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak sukuk terhadap perekonomian lebih ditentukan oleh akumulasi dana yang telah terserap dan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi riil, dibandingkan sekadar besaran penerbitan pada periode berjalan. Hal ini konsisten dengan temuan (Faiza & Shafiyatun, 2018) bahwa outstanding sukuk berpengaruh positif terhadap PDB karena mencerminkan dana yang telah benar benar terserap ke sektor produktif. Tidak signifikannya emisi sukuk juga sejalan dengan (Khairunnisa, 2024) yang menekankan bahwa keberhasilan sukuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh efektivitas penyaluran dana dan kualitas proyek yang dibiayai, bukan semata oleh nilai penerbitannya mengingat ukuran pasar sukuk yang secara relatif masih kecil dibandingkan instrumen keuangan lain.

Pada model obligasi, baik emisi ($p = 0,7438$) maupun outstanding obligasi ($p = 0,0567$) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB, meski keduanya menunjukkan arah hubungan positif. Kondisi ini sejalan dengan (Arinal, 2025) yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah obligasi yang beredar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas ekonomi apabila dana yang dihimpun lebih banyak dialokasikan untuk menutup defisit anggaran ketimbang membiayai investasi produktif yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Secara simultan, kedua model tetap signifikan (sukuk $p = 0,0078$; obligasi $p = 0,0332$), yang menunjukkan bahwa emisi dan outstanding dari masing-masing instrumen, jika diuji bersama-sama, tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB. Namun demikian, tingkat signifikansi dan kekuatan penjelasan (R^2) sukuk yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa sukuk memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan aktivitas

ekonomi riil dibandingkan obligasi sejalan dengan karakteristik sukuk sebagai instrumen keuangan berbasis aset (asset-based/asset backed) yang secara struktural terhubung langsung dengan proyek dan aset produktif pemerintah melalui skema PBS. Berbeda dengan hasil pada PDB, baik sukuk maupun obligasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Jalan Mantap Nasional, baik secara simultan maupun parsial. Emisi sukuk ($p = 0,7756$), outstanding sukuk ($p = 0,0634$), emisi obligasi ($p = 0,9901$), maupun outstanding obligasi ($p = 0,2011$) seluruhnya berada di atas taraf signifikansi 5%, meskipun arah hubungannya tetap positif.

Temuan ini sejalan dengan (Abitaha & Soelistyo, 2021) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan proyek jangka panjang sehingga dampak pembiayaan tidak dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Yuliani et al (2020) turut menegaskan bahwa efektivitas kedua instrumen terhadap hasil pembangunan fisik sangat bergantung pada kualitas implementasi proyek dan ketepatan alokasi anggaran, bukan semata pada besaran dana yang dihimpun. Selain itu, dana yang bersumber dari sukuk maupun obligasi tidak difokuskan hanya pada pembangunan jalan nasional, melainkan tersebar ke berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sumber daya air (Afandi & Amin, 2019) sehingga proporsi dana yang benar-benar terealisasi pada sektor jalan menjadi relatif terbatas. Adanya time lag antara penghimpunan dana dan realisasi fisik pembangunan turut memperkuat penjelasan mengapa pengaruh kedua instrumen belum terlihat signifikan pada periode observasi 2020–2024. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk dan obligasi negara sama-sama berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, namun dengan kekuatan pengaruh yang berbeda. Pada indikator pertumbuhan ekonomi (PDB), sukuk khususnya melalui outstandinnya menunjukkan dampak yang lebih kuat dan lebih nyata dibandingkan obligasi, sejalan dengan karakteristiknya sebagai instrumen berbasis aset riil yang terhubung langsung dengan proyek produktif melalui skema project based sukuk. Obligasi negara, meskipun tetap berperan penting sebagai sumber pembiayaan APBN yang mendukung program pembangunan di berbagai sektor, menunjukkan pengaruh yang relatif lebih terbatas karena orientasinya yang lebih banyak diarahkan pada penutupan kebutuhan fiskal jangka pendek.

Pada indikator pembangunan infrastruktur (Jalan Mantap Nasional), perbedaan dampak antara sukuk dan obligasi tidak lagi terlihat jelas, karena keduanya sama-sama belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kedua instrumen pada sektor infrastruktur lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan dana, ketepatan alokasi anggaran, dan keberhasilan pelaksanaan proyek, ketimbang oleh besaran dana yang berhasil dihimpun semata. Temuan ini sejalan dengan (Atikah et al., 2024) yang juga menemukan kemampuan penjelasan yang kuat dari instrumen sukuk terhadap variabel makroekonomi ($R^2 = 94,7\%$), memperkuat indikasi bahwa sukuk dan obligasi memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, meski tidak selalu berdampak setara terhadap capaian pembangunan fisik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sukuk relatif lebih unggul dibandingkan obligasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil. Obligasi tetap menjadi instrument pembiayaan yang penting, tetapi efektivitas kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan masih memerlukan optimalisasi,

terutama dalam hal ketepatan alokasi dan pengelolaan dana yang dihimpun.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk dan obligasi negara secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), tetapi belum berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang diukur melalui jalan mantap nasional. Secara parsial, hanya outstanding sukuk yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB, sementara emisi sukuk, emisi obligasi, maupun outstanding obligasi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan meskipun arah hubungannya tetap positif. Temuan ini mencerminkan karakteristik sukuk sebagai instrumen berbasis aset riil yang terhubung langsung dengan pembiayaan proyek produktif, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan aktivitas ekonomi riil dibandingkan obligasi, yang cenderung lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fiskal untuk mendukung berbagai program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Adapun pada indikator jalan mantap nasional, baik sukuk maupun obligasi sama-sama tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, baik secara simultan maupun parsial, sehingga belum terlihat perbedaan dampak yang berarti antara kedua instrumen pada sektor infrastruktur. Kondisi ini diduga disebabkan oleh adanya jeda waktu antara pengumpulan dana dan realisasi fisik pembangunan, serta alokasi dana yang tidak hanya difokuskan pada sektor jalan.

REFERENCES

- Abitaha, P. A., & Soelistyo, A. (2021). Analisis Pengaruh Sukuk Terhadap Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indoensia Tahun 2014 – 2018 . *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(1), 86–102.
- Afandi, M. A., & Amin, M. (2019). Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth: A Cross Province Analysis. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2). <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.10977>
- Arifin, R., & Taqwiem, A. (2024). Determinant of Rating Corporation Sukuk in Emerging Market. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1895–1904. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13303>
- Arinal, H. (2025). *Pengaruh Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015–2024*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid.
- Atikah, I., Sultan, U., & Hasanuddin Banten, M. (2024). *Efektivitas Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan*. <http://al-amwal.staimasi.ac.id>
- Cendekiawan, M., & Firmansyah, A. (2024). Pengembangan Green Bonds Di Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 87–100.
- Faiza, R. A. N., & Shafiyatun. (2018). Pengaruh Nilai Outstanding Sukuk Korporasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Periode Triwulanan Tahun 2011. *El-Qist: Journal of Islamic and Business (JIEB)*, 8(1), 1577–1596.
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>

- Fitriana, A., Harahap, S. C., Hanif, F. M., & Harahap, I. M. (2025). Perbandingan Kinerja Sukuk dan Obligasi Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi | JIMBE*, 3(5), 100–109.
- Kesumadewi, E., Aprilyani, & Nurcahya, F. (2024). Dinamika Pengelolaan Utang Serta Peran Sbn Sebagai Alternatif Instrumen Investasi. *ECo-Fin*, 6(3). <https://doi.org/10.32877/ef.v6i3.1460>
- Khairunnisa, M. (2024). *Mencari Peluang Pembiayaan Syariah Berkelanjutan* (Ayunindya Fara, Ed.). Jakad Media Publishing.
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427.
- Sakinah, H. F. (2021). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Hazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44.
- Suherman, I., Martin, A., Kurniawan, I., Qolyubi, A., Rusli, R., & Purnamasari, L. (2025). Bullying prevention strategies through school capacity building (SCB) in integrated Islamic schools to support the Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 164–175.
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., Al, S., & Garut, M. (2024). *Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Tamarysma, P. N., Widya, N. R., & Nike, R. A. (2017). *E-Profit Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Kupon Terhadap Harga Obligasi Pemerintah di Indonesia*.
- Wulandari, R., & Sumriyah, S. (2023). Penerbitan Obligasi Negara Sebagai Alternatif Pendanaan Defisit APBN Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 2(2), 18–29. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i1.1249>
- Yuliani, A. E., Fitrijanti, T., & Sari, P. Y. (2020). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2361. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2361-2374>